

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Agnes Nadia Prasetyana Siba Sabon

Universitas Udayana Denpasar

agnesnadialamapaha@gmail.com

I Nyoman Mahaendra Yasa

Universitas Udayana Denpasar

mahaendrayasa@unud.ac.id

Korespondensi penulis: nadialamapaha@gmail.com)

Abstract. Poverty is a multidimensional problem that not only affects economic aspects but also has serious implications for the social, political, and quality of development in a region. In East Nusa Tenggara Province, poverty remains a major challenge for complex and sustainable regional development. The high poverty rate in this region is often associated with suboptimal labour market conditions, low levels of education, and minimum wages that do not fully reflect the cost of living. Therefore, an in-depth study is needed to determine the extent to which these factors influence poverty levels at the district/city level. This study aims to analyse the influence of the variables of labour force size, education level, and district minimum wage (UMK) on poverty levels in 22 districts/cities in East Nusa Tenggara Province from 2019 to 2024. The method used in this study is a quantitative approach with an associative research design. The data analysed are panel data, consisting of a combination of cross-sectional data from 22 districts/cities and time-series data from 2019 to 2024, resulting in a total of 132 observations. To obtain accurate analysis results, a panel data regression model with a random effect model (REM) approach was used, selected based on the results of the Hausman test. The analysis results indicate that simultaneously, the three independent variables, namely labour force, education level, and district minimum wage, have a significant impact on the poverty rate of districts/cities in East Nusa Tenggara Province. Partially, the variables of labour force and education level have a negative and significant impact, meaning that an increase in the number of absorbed labour force and an increase in the education level of the community will reduce the poverty rate. Similarly, the minimum wage in the district also has a negative and significant effect on poverty, indicating that an increase in the minimum wage contributes to a decrease in the number of poor people, especially in districts/cities in East Nusa Tenggara Province.

Keywords: labour force, education level, minimum wage in the district (UMK), poverty level

Abstrak. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap dimensi sosial, politik, dan kualitas pembangunan suatu daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemiskinan masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah

yang kompleks dan berkelanjutan. Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah ini sering kali dikaitkan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang belum optimal, rendahnya capaian pendidikan masyarakat, serta tingkat upah minimum yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif. Data yang dianalisis merupakan data panel, yang terdiri dari gabungan data *cross-section* yaitu 22 kabupaten/kota dan data *time-series* dari periode tahun 2019 hingga 2024, sehingga menghasilkan total 132 pengamatan. Untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, digunakan model regresi data panel dengan pendekatan *random effect model* (REM), yang dipilih berdasarkan hasil uji Hausman. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan, ketiga variabel independen yaitu tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara parsial, variabel jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, yang berarti bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian pula, variabel upah minimum kabupaten juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan UMK berkontribusi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin khususnya kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci: tenaga kerja, tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten (UMK), tingkat kemiskinan

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang diharapkan memiliki tekad yang kuat untuk belajar dari negara-negara maju untuk mengejar ketertinggalan dengan cara melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang sering dialami oleh negara-negara berkembang (Nugraha, 2020). Kemiskinan seringkali di pahami sebagai suatu keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari (Rahayu, 2018). Kemiskinan muncul pada saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup.

Masalah kemiskinan di Indonesia menurut Suharto (2005:32), merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Kemiskinan sebagai standar tingkat hidup yang rendah dapat terlihat langsung pada tingkat

kesehatan dan kehidupan moral. Menurut Tambunan (2001:40), terdapat faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan yakni tingkat dan laju pertumbuhan produktivitas, tenaga kerja, tingkat upah neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, sumber daya alam, kesediaan fasilitas umum seperti pendidikan dasar, kesehatan, transportasi, listrik, air, dan alokasi pemukiman, kultur budaya politik, dan bencana alam. Kemiskinan di Indonesia selama tahun 2019 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah.

Menurut Kuncoro (2004:96), terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan. Pertama kemiskinan muncul karena adanya pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul karena perbedaan dalam hal akses modal. Lebih lanjut Karsmita (1996:53), mengemukakan bahwa penyebab ada empat (4) penyebab kemiskinan. Pertama, rendahnya taraf pendidikan, taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan. Kedua, rendahnya tingkat kesehatan, taraf kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikiran, dan prakarsa. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja, keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Keempat, banyak penduduk yang miskin secara ekonomi karena terpencil dan terisolasi, akan sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Menurut BPS Nasional (2022), dampak yang terjadi akibat tingginya tingkat kemiskinan di suatu negara diantaranya dapat menyebabkan tindak kriminal, gangguan kesehatan, pengangguran, kekacauan sosial, dan politik. Pemerintah telah melakukan banyak kegiatan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia diantaranya yaitu pada bidang kesehatan, pendidikan, keterampilan masyarakat, dan keamanan, namun hal ini tetap saja belum dapat mengurangi angka kemiskinan.

Bappenas (2022), mengatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan beragam di setiap daerah seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan nilai tambah

yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, hingga saat ini potensi tersebut belum dimaksimalkan secara efektif. Perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh sektor agraris yang bergantung pada lingkungan alam yang rentan, sementara laju pertumbuhan penduduk terus meningkat dan tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang memadai. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat investasi yang masuk ke daerah tersebut. Kesadaran terhadap kondisi kemiskinan umumnya muncul ketika individu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan individu lain yang memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi yang mempunyai otonomi daerah. Sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom, untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dilihat dari jumlah persentase penduduk miskin, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tinggi meskipun sudah memiliki adanya kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu adanya penurunan persentase penduduk miskin. Beberapa penemuan sebelumnya yang mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam memunculkan kemiskinan adalah tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum.

Menurut Todaro (2006:189), tenaga kerja (*labor force*) sebagai seluruh populasi yang secara aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, termasuk mereka yang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan. Saat ini terdapat masalah dalam ketenagakerjaan, tidak semua penduduk angkatan kerja dalam suatu daerah dalam keadaan bekerja ataupun memiliki pekerjaan. Masalah sempitnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya jumlah angkatan kerja ini mengindikasikan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan sejauh mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai tenaga kerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK sering dijadikan ukuran awal untuk melihat potensi sumber daya manusia suatu wilayah, namun tingginya TPAK tidak selalu berarti bahwa kesejahteraan masyarakat membaik, terutama jika tidak diikuti dengan

penciptaan lapangan kerja yang memadai. Menurut Sukirno (2011:328) bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan di banyak negara berkembang adalah tingginya jumlah pengangguran, yang merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan antara pasokan tenaga kerja dan permintaan terhadapnya.

Lebih lanjut Sukirno (2011:333) mengaitkan fenomena pengangguran dan kemiskinan dengan teori keynesian, yang menyatakan bahwa penyebab utama pengangguran adalah kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian, bukan karena ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja seperti yang diyakini oleh kaum klasik. Keynes (1936: 29) menyatakan bahwa dalam situasi resesi atau kelesuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga cenderung turun, investor asing menjadi ragu-ragu, dan ekspor menurun akibat lemahnya permintaan global. Dalam situasi tersebut, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan efisiensi tenaga kerja menjadi prioritas. Akibatnya, penciptaan lapangan kerja baru menjadi terbatas. Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendidikan rendah atau tidak memiliki keterampilan khusus, yang pada akhirnya mendorong masuk ke dalam kategori penduduk miskin. Kondisi seperti yang dijelaskan oleh Keynes (1936: 33) sangat relevan apabila dikaitkan dengan situasi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Manggarai Timur yaitu sebesar 81,73 persen dan terendah terdapat di Kota Kupang yaitu sebesar 64,14 persen. Pada tahun 2024 tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu sebesar 87,41 persen, dan terendah berada di Kota Kupang yaitu sebesar 67,01 persen. Data ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi kenaikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,11 persen dan pada tahun 2024 naik menjadi 77,50 persen. Meskipun TPAK di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, namun masih terdapat variasi yang cukup signifikan antar kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota mengalami peningkatan TPAK yang mencerminkan membaiknya keterlibatan penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, Kota Kupang secara konsisten menjadi wilayah dengan TPAK terendah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhaila dan Anwar (2020), yang menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif, maka akan keluar dari kondisi kemiskinan menjadi lebih besar. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Azevado *et al.* (2013), yang

menemukan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di negara seperti Paraguay dan Kosta Rika, yang menunjukkan bahwa partisipasi tenaga kerja dapat menurunkan kemiskinan secara nyata melalui peningkatan pendapatan rumah tangga dan akses terhadap pekerjaan produktif.

Faktor lain yang juga memengaruhi kemiskinan adalah tingkat pendidikan (Todaro dan Smith 2011:385). Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan berdampak pada peluang memperoleh pekerjaan yang layak. Menurut Todaro dan Smith (2011:386), rendahnya tingkat pendidikan akan menghambat produktivitas tenaga kerja dan mempersempit kesempatan kerja, terutama di sektor formal yang menuntut keahlian dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, masyarakat dengan rata-rata lama sekolah yang rendah cenderung terperangkap dalam pekerjaan informal berupah rendah, atau bahkan menganggur, sehingga meningkatkan risiko terhadap kemiskinan

Sejalan dengan hal tersebut, teori *human capital* menurut Becker (1985:16), yang menegaskan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan individu, yang pada akhirnya akan menaikkan produktivitas serta penghasilan seseorang dalam jangka panjang. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk bekerja di sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi dan memiliki daya saing yang kuat dalam pasar tenaga kerja (Becker: 1985:19). Dengan kata lain, pendidikan berperan sebagai aset ekonomi bagi seseorang, di mana semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan dan semakin kecil kemungkinan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Salsabil dan Riani (2023), yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, temua ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang, maka semakin rendah kemungkinan untuk berada dalam kondisi kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendidikan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi, sehingga membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi faktor penting dalam strategi pengentasan kemiskinan. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Spada. *et al* (2023), yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 negara Eropa, hasil ini mengindikasikan bahwa pendidikan dianggap sebagai instrumen startegis yang tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat daya saing di pasar tenaga kerja serta mengurangi risiko keterpinggiran sosial. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa investasi di

sektor pendidikan merupakan salah satu upaya yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.

Faktor lain yang menyebabkan munculnya kemiskinan adalah upah minimum (Sukirno, 2011:238). Menurut Sukirno (2011:239), upah minimum merupakan tingkat upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada buruhnya, dan kebijakan ini biasanya ditetapkan untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja serta memastikan taraf hidup minimum. Upah minimum kabupaten (UMK) adalah standar upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja dari perusahaan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak (KHL) yang berlaku di kabupaten/kota bersangkutan. Namun, dalam praktiknya, penetapan upah minimum ini tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, terutama jika tidak diiringi dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal dan produktivitas yang meningkat. Gagasan upah minimum ini sudah mulai dari tahun 1970 dengan tujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum setiap daerah paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Menurut Mankiw (2006:133-134), upah minimum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran yang berdampak pada tingkat kemiskinan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2021) yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, hasil penemuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja, khususnya di sektor formal, sehingga daya beli dan kesejahteraan menjadi meningkat. Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Olanrewaju (2022), yang menemukan bahwa upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nigeria, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan upah minimum memiliki peran penting dalam memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan. Peningkatan upah minimum di Nigeria terbukti mampu meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga memperbaiki daya beli dan taraf hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji seberapa besar pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, upah minimum kabupaten/kota (UMK) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat kemiskinan di 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2019–2024. Tahun 2019 dipilih sebagai titik

awal karena merupakan masa sebelum pandemi COVID-19, sedangkan tahun 2024 digunakan karena merupakan data terbaru yang tersedia. Objek penelitian ini adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh tiga variabel independen tersebut, dan seluruh data diperoleh dari sumber sekunder seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT (Sugiyono, 2017; BPS NTT, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat numerik serta data kualitatif berupa teori dan konsep yang relevan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi data panel, dengan pertimbangan karakteristik data yang memadukan dimensi waktu (time series) dan wilayah (cross section). Terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi panel yang digunakan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), yang pemilihannya dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (Wooldridge, 2018).

Untuk memastikan kelayakan model, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji signifikansi regresi dilakukan baik secara simultan (Uji F) maupun parsial (Uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran empiris yang kuat dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan pengupahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Ghozali, 2018; Basuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

	X1	X2	X3	Y
Mean	74.06258	7.652348	1999533.	21.09598
Median	74.06500	7.505000	1975000.	22.06500
Maximum	87.41000	11.64000	2250419.	34.62000
Minimum	58.75000	5.960000	1795000.	6.220000
Std. Dev.	5.451979	1.065768	128942.0	6.944911
Skewness	-0.157980	2.116114	0.044235	-0.201435
Kurtosis	2.944816	8.930916	2.047160	1.906857
Jarque-Bera	0.565819	291.9813	5.036525	7.464960
Probability	0.753588	0.000000	0.080600	0.023933

Sum	9776.260	1010.110	2.64E+08	2784.670
Sum Sq. Dev.	3893.853	148.7980	2.18E+12	6318.364
Observations	132	132	132	132

Sumber: Data diolah, 2025

Analisis ini didasarkan pada data panel 6 tahun dari setiap kabupaten/kota di Provinsi NTT. Penjabaran hasil uji statistik deskriptif berdasarkan Tabel 1.

1) Tingkat Kemiskinan (Y)

Rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 21,09 persen dengan nilai maksimum 34,62 persen dan minimum 6,22 persen. Secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren penurunan dari 21,09 persen pada tahun 2019, turun menjadi 19,84 persen pada tahun 2024. Dilihat dari data per kabupaten/kota, terdapat perbedaan yang signifikan. Kabupaten Sumba Tengah menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 30,84 persen, dan kota Kupang memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 8,24 persen pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya penyerapan tenaga kerja, masih terbatasnya akses terhadap pendidikan, dan masih rendahnya upah yang diterima oleh masyarakat, sehingga membuat mereka terus mengalami permasalahan kemiskinan.

2) Variabel Tenaga Kerja (X1)

Rata-rata tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 74,06 persen dengan nilai maksimum mencapai 87,41 persen dan minimum 58,75 persen, yang menunjukkan bahwa adanya variasi yang cukup besar dalam jumlah tenaga kerja di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi kabupaten dengan TPAK tertinggi yaitu sebesar 87,41 persen, dan TPAK terendah terdapat di Kota Kupang yaitu 67,01 persen pada tahun 2024. Penyerapan TPAK di Kabupaten Timor Tengah Selatan lebih tinggi dibandingkan Kota Kupang karena banyak penduduknya yang hidup dalam kemiskinan, sehingga lebih banyak anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak muda, terpaksa ikut bekerja, terutama di sektor informal seperti pertanian. Sementara Kota Kupang, banyak penduduk masih sekolah atau menunggu pekerjaan formal, sehingga TPAK-nya lebih rendah meskipun kondisi ekonominya lebih baik. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa belum meratanya penyerapan tenaga kerja dan masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Tingkat Pendidikan (X₂)

Rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 7 tahun, dengan nilai maksimum 11 tahun dan minimum 5 tahun. Kota Kupang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu mencapai 11,64 tahun pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih maju dan akses yang lebih baik ke fasilitas pendidikan. Sementara Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki rata-rata lama sekolah terendah yaitu 6,39 tahun pada tahun 2024, meskipun sudah meningkat dari 6,33 tahun dari tahun 2019. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa akses dan kualitas pendidikan masih belum merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4) Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Rata-rata upah minimum kabupaten (UMK) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Rp 1.999.533 juta dengan nilai maksimum mencapai Rp 2.250.419 juta dan nilai minimum Rp 1.795.000 juta. Kota Kupang memiliki rata-rata upah minimum tertinggi mencapai Rp 2.250.000 juta pada tahun 2024. Sementara itu, 21 kabupaten lainnya memiliki rata-rata upah minimum terendah yaitu Rp 2.186.826 juta pada tahun 2024. Meskipun upah minimum kabupaten (UMK), mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih terlihat jelas. Upah yang lebih tinggi di daerah perkotaan mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, sementara daerah pedesaan masih tertinggal.

Regresi Data Panel

Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

a) Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	571.343026	(21,107)	0.0000
Cross-section Chi-square	624.170164	21	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Pada Tabel 2 nilai distribusi chi-square dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan Eviewa 9 adalah 624.170164 dengan probabilitas 0.0000 ($< 0,05$) sehingga model yang digunakan yaitu *fixed effect model* (FEM).

b) Uji Hausman

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.481965	3	0.0580

Sumber: Data diolah, 2025

Pada Tabel 3 nilai distribusi *chi-square* dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan *eviews* 9 adalah 7.481 dengan probabilitas 0.0580 (> 0.05) maka model yang digunakan yaitu *random effect model* (REM).

c) **Uji Lagrange Multiplier**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang tepat digunakan antara model *random effect model* (REM) dan *common effect model* (CEM). Jika nilai *cross-section breusch-pagan* > 0.05 maka *common effect model* (CEM) yang akan digunakan. Sebaliknya jika nilai *cross-section breusch-pagan* < 0.05 , maka *random effect model* yang akan digunakan.

Pada Tabel 4 nilai *cross-section breusch-pagan* dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan *eviews* 9 adalah 306.3450 dengan probabilitas 0.0000 (< 0.05) sehingga H_1 diterima *random effect model*, maka model yang digunakan yaitu (REM)

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test Hypothesis	Cross-section	
	Time	Both
Breusch-Pagan	306.3450 (0.0000)	2.564104 308.9091 (0.1093) (0.0000)

Sumber: Data diolah, 2025

1) **Regresi Data Panel Dengan Random Effect Model (REM)**

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36.96724	2.239897	16.50399	0.0000
X1	-0.036674	0.017607	-2.082941	0.0396
X2	-1.285396	0.402636	-3.192455	0.0019
X3	-1.66E-06	7.47E-07	-2.221988	0.0284

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan *random effect model* (REM), maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

$$Y = 36,967 - 0,037X_1 - 1,285X_2 - 0,00000166X_3 + \mu$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi linier variabel (X_1) tenaga kerja

β_2 = Koefisien regresi linier variabel (X_2) tingkat pendidikan

β_3 = Koefisien regresi linier variabel (X_3) upah minimum kabupaten (UMK)

X_1 = Variabel tenaga kerja

X_2 = Variabel tingkat pendidikan

X_3 = Variabel upah minimum kabupaten (UMK)

μ = Persentase kesalahan

Berdasarkan hasil estimasi regresi dengan *random effect model* (REM), dapat diinterpretasikan bahwa.

a) Konstanta ($\alpha = 36,967$), menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan UMK (X_3) diasumsikan bernilai nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 36,967 persen. Nilai ini merupakan rata-rata awal kemiskinan tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas.

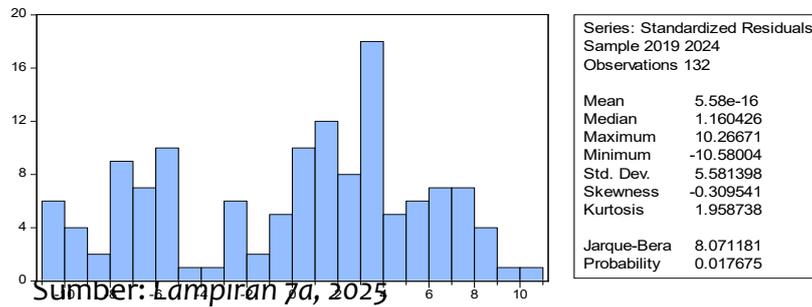
b) Koefisien X_1 (-0,037), menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen pada jumlah tenaga kerja akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,037 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Ini menunjukkan bahwa tenaga kerja berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

c) Koefisien X_2 (-1,285), menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun pada tingkat pendidikan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,285 persen, artinya tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena dapat meningkatkan kualitas SDM.

d) Koefisien X_3 (-0,00000166), berarti bahwa setiap kenaikan Rp 1 dalam UMK akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,00000166 persen. Walaupun pengaruhnya kecil, peningkatan UMK tetap berkontribusi dalam menekan kemiskinan.

2) Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa prob 0.017675 atau lebih besar dari pada $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam penelitian ini telah berdistribusi normal, oleh karena residual model berdistribusi normal maka model layak digunakan untuk menganalisis lebih lanjut.

b) Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.305759	0.435917
X2	-0.305759	1.000000	0.236268
X3	0.435917	0.236268	1.000000

Sumber: Data diolah, 2025

c) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.670350	1.906663	5.071872	0.0000
X1	-0.025523	0.016503	-1.546610	0.1244
X2	-0.160395	0.310779	-0.516105	0.6067
X3	-5.47E-07	6.54E-07	-0.836730	0.4043

Sumber: Data diolah, 2025

Pengujian Hipotesis

1) Uji Signifikansi Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji Simulatan (Uji F)

R-squared	0.994291	Mean dependent var	21.09598
Adjusted R-squared	0.993010	S.D. dependent var	6.944911
S.E. of regression	0.580621	Akaike info criterion	1.919377
Sum squared resid	36.07190	Schwarz criterion	2.465362
Log likelihood	-101.6789	Hannan-Quinn criter.	2.141240
F-statistic	776.4646	Durbin-Watson stat	1.520033
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data diolah, 2025

a) Rumusan Hipotesis

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, artinya tenaga kerja (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan upah minimum kabupaten (UMK) (X_3) tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H_1 : Paling tidak satu dari $\beta_i \neq 0$, artinya variabel tenaga kerja (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan upah minimum kabupaten (UMK) (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Taraf Nyata

$$\begin{aligned} \alpha &= 5\%; \text{ df} = (k-1) (n-1) \\ F_{\text{tabel}} &= F_{0.05 ; (k-1) (n-1)} \\ &= F_{0.05 ; (4-1) (132-4)} \\ &= F_{0.05 ; 3 ; 128} \\ &= 2,79 \end{aligned}$$

c) Kriteria Pengujian

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Jika $F_{\text{hitung}} \leq F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

d) Simpulan

Oleh karena $F_{\text{hitung}} (776.4646) > F_{\text{tabel}} (2,79)$ dengan probabilitas sebesar $0.000000 \leq 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini berarti bahwa variabel tenaga kerja (X_1), tingkat pendidikan (X_2), dan upah minimum kabupaten (X_3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Uji Signifikansi Koefisien Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat) secara parsial dengan asumsi variabel lain konstan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk bisa mengetahui pengaruh

secara parsial dari masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini. Adapun uji t dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1) Pengaruh Tenaga Kerja (X₁) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

a) Rumusan Hipotesis

H₀ : $\beta_1 \geq 0$, berarti tenaga kerja tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H₁ : $\beta_1 < 0$, berarti tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Taraf Nyata

Menentukan taraf nyata (α) = 5% = 0.05 dan df (n-k) = (132-4) = 128 untuk menentukan nilai t_{tabel}. Nilai t_{tabel} yang dimaksud adalah t _{α ; (n-k)} = t_{0.05; 128} = 1.65493

c) Kriteria Pengujian

Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel}, maka H₀ diterima atau apabila Sig > α = 0.05

Jika t_{hitung} > t_{tabel}, maka H₀ ditolak atau apabila Sig ≤ α = 0.05

d) Simpulan

Uji t terhadap variabel tenaga kerja (X₁), menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -2.082941 dan nilai prob yang diperoleh sebesar 0.0396 ≤ 0.05, maka secara parsial tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

a) Rumusan Hipotesis

H₀ : $\beta_2 \geq 0$, berarti tingkat pendidikan tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H₁ : $\beta_2 < 0$, berarti tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Taraf Nyata

Menentukan taraf nyata (α) = 5% = 0.05 dan df (n-k) = (132-4) = 128 untuk menentukan nilai t_{tabel}. Nilai t_{tabel} yang dimaksud adalah t _{α ; (n-k)} = t_{0.05; 128} = 1.65493

c) Kriteria Pengujian

Jika t_{hitung} ≤ t_{tabel}, maka H₀ diterima atau apabila Sig > α = 0.05

Jika t_{hitung} > t_{tabel}, maka H₀ ditolak atau apabila Sig ≤ α = 0.05

d) Simpulan

Uji t terhadap variabel tingkat pendidikan (X_2), menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -3.192455 dan nilai prob yang diperoleh sebesar $0.0019 \leq 0.05$, maka secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3) Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

a) Rumusan Hipotesis

$H_0 : \beta_3 \geq 0$, berarti upah minimum kabupaten (UMK) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

$H_1 : \beta_3 < 0$, berarti upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b) Taraf Nyata

Menentukan taraf nyata (α) = 5% = 0.05 dan $df (n-k) = (132-4) = 128$ untuk menentukan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} yang dimaksud adalah $t_{\alpha; (n-k)} = t_{0.05; 128} = 1.65493$

c) Kriteria Pengujian

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima atau apabila $Sig > \alpha = 0.05$

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak atau apabila $Sig \leq \alpha = 0.05$

d) Simpulan

Uji t terhadap variabel upah minimum kabupaten (UMK) (X_3), menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -2.221988 dan nilai prob yang diperoleh sebesar $0.0284 < 0.05$, maka secara parsial upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Secara Simultan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan analisis data, hasil uji F menunjukkan nilai *probability* yang diperoleh sebesar $0.0000 < 0.05$. Ini berarti tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK) dapat menjelaskan variasi (naik turunnya) kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0.9930 atau sebesar 99,30

persen, sedangkan 0,70 persen kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Secara Parsial Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1) Pengaruh Tenaga Kerja (X₁) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja (X₁) memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar -0.036674 dan signifikan, yang berarti secara parsial tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, setiap peningkatan satu persen dalam TPAK dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,036 persen. Temuan ini juga menunjukkan bahwa semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, maka semakin besar kontribusinya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya usia produktif, lebih banyak terserap dalam pasar kerja. Hal ini sangat penting, terutama di daerah yang masih menghadapi tantangan ekonomi dan kemiskinan tinggi. Namun, masih banyak kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencatatkan TPAK yang belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya investasi yang masuk, sehingga pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah menjadi stagnan, dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru yang memadai. Ketika investasi meningkat, maka aktivitas ekonomi juga meningkat, sehingga kesempatan kerja terbuka lebih luas, dan TPAK pun akan naik secara alami. Dalam konteks ini, TPAK yang ideal biasanya berada di atas 70 persen, tergantung struktur ekonomi wilayah. Oleh karena itu, peningkatan investasi menjadi langkah awal yang penting untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.

2) Pengaruh Tingkat Pendidikan (X₂) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan hasil uji t, variabel tingkat pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -1.285396 dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, peningkatan satu tahun rata-rata lama sekolah secara nyata dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,28 persen. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam pengurangan kemiskinan, karena semakin tinggi jenjang

pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang lebih tinggi, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur dan akses pendidikan yang memadai. Kondisi ini tidak terlepas dari masih rendahnya alokasi anggaran pendidikan di sejumlah kabupaten/kota, yang bahkan belum memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu alokasi minimal 20 persen dari APBD untuk sektor pendidikan. Berdasarkan data, beberapa daerah seperti Kabupaten Ngada 12,36 persen, Nagekeo 14,03 persen, Timor Tengah Selatan 16,32 persen dan Ende 16,97 persen, masih mencatatkan anggaran pendidikan di bawah ambang batas minimal. Keterbatasan anggaran ini berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah, tenaga pendidik, perpustakaan, laboratorium, serta beasiswa dan pelatihan vokasi bagi siswa miskin.

3) Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) (X₃) Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten (UMK) memiliki koefisien regresi negatif yaitu sebesar $-1.66E-06$ dan berpengaruh signifikan, yang berarti bahwa peningkatan UMK berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun koefisien ini bernilai sangat kecil karena UMK diukur dalam satuan rupiah, temuan ini tetap menunjukkan bahwa setiap peningkatan Rp 1 dalam upah minimum kabupaten dalam jumlah yang cukup signifikan, dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,000000166. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan minimum berfungsi sebagai alat proteksi sosial ekonomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Peningkatan UMK berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat, khususnya pekerja sektor informal dan formal di level bawah, serta mendorong perputaran ekonomi lokal.

KESIMPULAN

- 1) Tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan upah minimum kabupaten (UMK) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Variabel tenaga kerja secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan, dan upah

minimum kabupaten (UMK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR REFERENSI

- Aliyah, T., Bahtiar, M, Y., dan Zulaikah. (2025). Pengaruh Bantuan Sosial, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*. Vol. 05. No. 02. Pp. 491-508.
- Amalia, A. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Gender Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal At-Tawassuth*. Vol. 1. No. 2. pp 337-350
- Aulia, R.M., Herlita., dan Nurjana, S. (2021). The Impact of Education and Investment on Poverty Indonesia. *Journal of Economic Education, Office and Accounting*. Vol. 10. No. 07. pp.2302-2663.
- Arafat, M., and Khan, M. (2022). Effect of Education on Poverty and Wellbeing of Rural Households in District Hangu, Khyber Pakhtunkhwa. *Journal of Managerial Sciences*. Vol. 16. No. 1. pp. 63-92.
- Arsyad, L. (2010). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPFE.
- Awan, A. G., and Perveen, Z. (2019). Impact of Minimum Wage Policies on Poverty Alleviation in Pakistan. *Global Journal of Management, Social Sciences and Humanities*. Vol. 5. No. 2. pp. 227-239.
- Awan., Sarwar, M., Nouman., Haroon., Waqas., and Muhammad. (2011). Impact of Education on Poverty Reduction. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*. Vol. 1. No. 1. pp.1-11.
- Azevedo, J.P., Inchauste, G., Olivieri, S., Saavedra, J., and Winkler, H. (2013). Is Labor Income Responsible for Poverty Reduction. *Policy Research Working Paper*. Vol. 4. No. 1. pp. 1-36
- Azizah, E. W., Sudarti, S., dan Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. Vol. 2. No. 1. pp. 167-180.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2022). *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PK)*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004). *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (RAN-PK)*. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Upah Minimum dan Indikator Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: BPS
- Bank Dunia. (2020). *Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune*. Washington, DC: World Bank.

- Bassier, I., and Ranchhod, V. (2023). Can Minimum Wages Effectively Reduce Poverty under Low Compliance? A Case Study from the Agricultural Sector in South Africa. *Review of Political Economy*. Vol. 36. No. 2. pp. 398-419.
- Basuki, A. T. (2016). *Analisis Regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis*. (Edisi Kedua). Jakarta: Rajawali Pers.
- Basuki, A.T, dan Yuliadi,I. (2015). *Ekonometrika Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Becker, G. S. (1985). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bunga, E. N, dan Haryanto, T. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*. Vol. 8. No. 3. pp. 3016-3031.
- Chambers, R. (2010). *Paradigms, Poverty, and Adaptive Plauralism*. London: IDS Working Paper.
- Corten, D. C. (1997). *Menuju Abad ke-21*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Delviera, A dan Amar, S. (2024). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Indoensia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*. Vol. 1. No. 4. pp. 655-662
- Djamil, M. (1998). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Detragiache, E., Ebeke, C., Jirasavetakul, L. F., Kirabaeva, K., Malacrino, D., Misch, F., Park, H. W., and Shi, Y. (2020). A European Wage: Implications for Poverty and Macroeconomic Imbalances. *IMF Working Paper*. Vol 20. No.59. pp. 1-46.
- Eko, C. R, dan Yasin, H. (2017). *Spasial Data Panel*. Yogyakarta: Wade Group.
- Faisal, F. (2020). Non Formal Education and Reduction of Poverty in Rural Areas. *Jurnal Edukasi Nonformal*. Vol.1. No.1. pp. 106-114.
- Faharuddin and Endrawati, D. (2022). Determinants of Working Poverty in Indonesia. *Journal od Economics and Development*. Vol. 24. No.3. pp. 230-246.
- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal Sosial Humaniora Terapan*. Vol. 1. No. 1. pp. 1152-1764.
- Gatiningsih, S. (2003). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis (Seventh Edition)*. Boston: Person Education Limited.
- Ghozali,I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometric*. New York: Mcgraw-Hill Higher Education.
- Hanifah, S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan. *Journal of Economics*. Vol. 1. No. 3. pp. 2798-5008.

- Hierdawati, T. (2022). Pengaruh TPAK, Kesehatan, dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*. Vol.1 No. 8. pp. 958-966.
- Janjua, P. Z and Kamal U. A. (2011). The Role of Education and Income in Poverty Alleviation: A Cross-Country Analysis. *The Lahore Journal of Economics*. Vol.16. No.1. pp. 143-172.
- Karsidi, R. (2005). *Pendidikan dan Ekonomi*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Wilayah dan Kawasan UNS.
- Karsmita (1996). *Kemiskinan/: Penyebab dan Solusinya*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 Tentang Upah Minimum*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Grafika.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Jakarta: Kementrian Sosial.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 Tentang Pengupahan*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja.
- Kesuma, I. K. M., dan Yasa, I. N. M (2025). Determinan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Vol.8. No.1. pp.1416-1425.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London: Macmillan.
- Kuncoro, M. (2004). *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Lanjouw, P., M. Pradhan, Sadah, H. Sayed, R., and Sparrow. (2014). *Poverty Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending*. World Bank Working Paper. No. 2739, Washington D.C: World Bank
- Lewis, M. (1961). *The City In History: Its Origins, its Transformations, and its Prospect*. New York: Harcourt, Brace and World, inc
- Loka, R.D.P., dan Purwanti, P. A.P. (2022). The Effect of Unemployment, Education and the Number of Population on the Poverty Level of Regency/City in Bali Province. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*. Vol. 6. No. 2. pp. 2622-4771
- Manning, C., & Sumarto, S. (2011). *Employment, Living Standards and Poverty in Contemporary Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Mankiw, N.Gregory.(2006). *Pengantar Ekonomi Makro* (edisi ketiga).Jakarta: Salemba Empat
- Marhaeni, A.A.I.N., dan Yuliarmi,N.N. (2019). *Metode Riset Jilid 1*. CV. Denpasar: Sastra Utama.
- Matondang, K. A. Nasution,N. F., dan Hasibuan, Z. H. (2024). Pengaruh TPAK, IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera utara. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*. Vol. 2. No.2. pp. 3025-7794.
- Milton, H, and Beng, H. (2012). The Society for Economic Analysis Limited. *Review Economic Studies* (1982) XLIX, 315-333. Northwestern University.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muttaqin,M, dan Anwar, K. (2023). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran, dan TPAK Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Ekonomi*. Vol. 2. No. 2. pp. 2963-3052.
- Murialti, N, dan Romanda, R. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. Vol. 10. No. 1.pp. 109-118.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Gerald Duckworth & Co.
- Nugraha, D. P. (2020). Kemiskinan di Kota Bengkulu, Apa Penyebabnya?. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 20. No. 1. pp. 31-37
- Nurkse, R. (1953) *Problem of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Oxford University Press
- Nurhaila. dan Anwar, K. (2020). Analisis Pengaruh TPAK, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*.Vol. 06. No. 2. pp.2615-126x.
- Olanrewaju, O. (2022). Minimum Wage, Poverty and Social Welfare in Nigeria: Revisting Distributive Justice. *Ife Social Sciences Review*.Vol. 30. No. 2. pp. 53-63.
- Pauw, K., dan Leibbrandt, M. (2012). Minimum wages and household poverty: General equilibrium macro-micro simulations for South Africa. *World Development*.Vol.40. No. 4. pp. 771-783
- Poy, S. (2023). In-Work Poverty Dynamics: Trigger Events and Short-Term Trajectories Argentina. *Journal for Labour Market Research*. Vol. 57. No.24. pp 1-24
- Rachman, A. (2005). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahayu, Y. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi. *Journal of Economics and Business*. Vol. 2. No. 1. pp. 165 174.

- Ramahdan, D. A., Setyadi, D., dan Wijaya, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Samarinda. *Inovasi*. Vol. 13. No.1. pp. 1-18.
- Ricardo, D. (1817). *On The Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.
- Saddique, A. B. (2023). Job Market Polarization and American Poverty. *Journal for Labour Market Research*. Vol.57. No.30. pp 1-30.
- Sagala, S. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat*. Bandung: Nusa Media.
- Salsabila, I, dan Riani, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB)*. Vol.3. No. 1. pp. 2808-3024.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*. Vol. 10. No.2. pp. 121-130.
- Sihite, A., Berutu, E., Andini, P., Murtahadi, dan Saturidar. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan TPAK Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*. Vol. 3. No. 3. pp. 2985-4682.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sianturi, A.F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M, D., dan Sianturi, D. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*. Vol, 1. No.2. pp. 3032-3495.
- Sotomayor, O. (2019). Growth with Reduction in Poverty and Inequality: Did Brazil Show the Way?. *The Journal of Economic Inequality*. Vol 6. No. 7. pp. 1-10.
- Sudiharta, P. S. P., dan Sutrisna, K. (2014). Pengaruh PDRB Perkapita, Pendidikan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. Vol. 3. No.10. pp. 431-439.
- Sugiyono (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Agenda Strategi, DEPSOS RI. [Preprint].
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, E, Rochaida, E., dan Ulfah, Y. (2018). Pengaruh Inflasi dan Pendidikan Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan. *Inovasi*. Vol. 13. No1. pp. 9-27.
- Spada, A., Fiore, M., and Galati, A. (2023). The Impact of Education and Culture on

- Poverty Reduction: Evidence from Panel Data of European Countries. *Social Indicators Research*. Vol. 2. No.23. pp. 1007-1120.
- Syafri, S. dan Febrianti, P. A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan PDRB, Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Metrik Serial Himaniora dan Sains*. Vol. 2. No.1. pp. 2774-2377.
- Tambunan, T.T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia (Teori dan Temuan Empiris)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M.P (2006) *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan)*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesepuluh)*. Jakarta: Erlangga.
- Utama, M. S. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. CV. Denpasar: Sastra Utama.
- Wooldridge, J.M. (2018). *Introductory Econometrics a Modern Approach*. 7th ed. Boston: Cengage Learning.
- World Bank. (2015). *Making Service Work For Poor People*. World Development Report. IBRD/The World Bank: Washington DC.